

**LAPORAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
RUDO INDOBANK
TAHUN 2020**



Kantor Pusat: Ruko Murni Blok F-G, Jl. Gajah Mada No. 144 Semarang
Telp. (024) 3584545 Fax. (024) 3584022
Kantor Cabang: Jl. Prof. Hamka No. 20B/1 Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7625388 Fax. (024) 7623788
Kantor Kas: Jl. Wolter Monginsidi No. 999 Semarang
Telp. (024) 76415719 Fax. (024) 6705507
[Situs: www.rudoindobank.com](http://www.rudoindobank.com)

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR RUDO INDOBANK	2
III.	HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR RUDO INDOBANK	16
IV.	PENUTUP	19
V.	LAMPIRAN	20

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR RUDO INDOBANK TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 Indonesia dan bahkan dunia sedang dilanda pandemi virus yang luar biasa, yakni covid-19 dimana memberikan dampak yang luar biasa sehingga seluruh sektor kehidupan dan usaha mengalami penurunan. Kebijakan-kebijakan pemerintah dan internal perusahaan dilakukan perubahan agar dapat memitigasi risiko atas dampak covid-19.

Dalam menjalankan operasional perbankan PT. BPR Rudo Indobank tetap berkomitmen untuk senantiasa berpedoman pada prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang baik. Prinsip-prinsip Tata Kelola diantaranya keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Aspek transparansi penerapan Tata Kelola BPR ini merupakan salah satu cakupan dari kewajiban pelaporan penerapan Tata Kelola.

Penerapan Tata Kelola paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. batas maksimum pemberian kredit;
- h. rencana bisnis BPR;
- i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berikut hasil penerapan Tata Kelola PT. BPR Rudo Indobank untuk tahun 2020. Semoga kedepan dapat meningkatkan serta mengoptimalkan kinerja seluruh aspek perusahaan. Dengan berpegang pada komitmen visi dan misi yang ada.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR RUDO INDOBANK

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : Pebruono</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab penuh melaksanakan kepengurusan BPR. b. Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan c. Memastikan penerapan Tata Kelola pada BPR d. Memastikan tindaklanjut atas temuan terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
2.	<p>Nama : -</p> <p>Jabatan : -</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p> <p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan PPAP kredit telah dilakukan sesuai ketentuan, terkait terdapat ketentuan kebijakan masa pandemi Covid-19 dimana PPAP lancar tidak dibentuk atau nol (0) akan tetap dilakukan pemantauan seiring batas waktu kebijakan tersebut. b. Optimalisasi penggunaan Website BPR Rudo dan Media Sosial

- resmi BPR Rudo. Saat ini media sosial Instagram @bprudo selalu dilakukan pengkinian terkait informasi untuk nasabah. Untuk *website* dalam pengembangan dan penyempurnaan untuk menu dan informasi, telah disediakan informasi produk dan permohonan kredit secara *online*.
- c. Tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan upaya penyelesaian kredit bermasalah untuk proses lelang atau jual jaminan.
 - d. Peningkatan kompetensi bagian analisis kredit di tahun 2020 belum dilaksanakan karena pemberian pendidikan sesuai target RBB yang ada. Selanjutnya akan dilaksanakan di tahun 2021.
 - e. Pemenuhan struktur organisasi yang masih belum terisi, tetap dilakukan proses rekrutmen dan pemilihan kandidat sesuai spesifikasi kebutuhan.
 - f. Komitmen pelemparan kredit dengan memprioritaskan pada angka plafon maksimal Rp. 500 juta. Hal ini sehubungan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh wilayah daerah.
 - g. Terus berupaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan BPR menjadi predikat SEHAT.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : Wahyu Mustikasari</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS serta bertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pelaksanaan pengawasan perseroan. b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola

menyerahkan jaminan untuk dilelang/dijual.

- e. Perbaiki cara analisa kredit dengan meningkatkan kompetensi bagian analis kredit. Agar potensi risiko dalam penyaluran kredit dapat dimitigasi.
- f. Segera lengkapi struktur organisasi yang masih terdapat kosong jabatan.
- g. Guna pelaksanaan Manajemen Risiko khususnya di penyaluran kredit, agar diprioritaskan pemberian kredit di sektor ritail dengan maksimal plafon Rp. 500 juta.
- h. Diharapkan Direksi segera menentukan strategi yang efektif untuk mencapai target yang ditetapkan dan juga untuk meningkatkan tingkat kesehatan dari posisi CUKUP SEHAT menjadi SEHAT.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam hal ini PT. BPR Rudo Indobank **belum memiliki kewajiban** untuk pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Pebruono	-	0	0
2.	-	-	-	-

Dalam hal ini dipastikan bahwa Direksi tidak memiliki hak saham di PT. BPR Rudo Indobank.

	<p>pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan.</p>
2.	<p>Nama : Hary Purwowidodo</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS serta bertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pelaksanaan pengawasan perseroan.</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan.</p> <p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <p>a. Pastikan segera tindak lanjut terhadap pemenuhan PPAP.</p> <p>b. Lanjutkan penggunaan Teknologi Infomasi dalam kegiatan pemasaran maupun kegiatan di bidang operasional untuk memberikan kemudahan kepada nasabah.</p> <p>c. Tetap prudent dan hati-hati dalam penyaluran kredit dan terapkan GCG dalam operasional sehari-hari.</p> <p>d. Segera upayakan penuruna NPL, dengan penjualan aset/ jaminan yang ada, karena sebagian debitur sudah</p>

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyu Mustikasari	-	0	0
2.	Hary Purwowidodo	-	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nominal (Rp)	Perse ntase Kepe milik an (%)
1.	Wahyu Mustikasari	-	-	0	0
2.	Hary Purwowidodo	-	- 600717 - 600876	- Rp. 900.000.000,- - Rp. 473.239.200,-	- 10% - 9,52%

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyu Mustikasari	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hary Purwowidodo	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Pebruono	-	-	0	0
2.	-	-	-	-	-

Dalam hal ini dipastikan bahwa Direksi tidak memiliki saham di Bank/ perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Pebruono	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	-	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Pebruono	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	-	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyu Mustikasari	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hary Purwowidodo	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2 (dua)	Rp.360.000.000	2 (dua)	Rp. 344.520.000
2.	Tunjangan	2 (dua)	Rp.207.000.000	2 (dua)	Rp. 42.000.000
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total			Rp. 567.000.000		Rp. 386.520.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah(Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap)	3 (tiga)	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	3 (tiga)	0

Permasalahan hukum perdata yang dijalankan BPR Rudo Indobank adalah berupa Gugatan Sederhana atas Kredit Bermasalah, dengan nilai gugatan materiil dibawah Rp. 200 Juta. Dalam kurun waktu tahun 2020 terdapat 3 (tiga) gugatan sederhana atas Kredit bermasalah. Seluruhnya telah mendapatkan putusan dengan ketetapan hukum dari Pengadilan Negeri Semarang (*Inkracht*).

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Mulyono Tjahjono	PSP	-	Pebruno	Direktur Utama	-	Biaya Sewa Mobil Operasional BPR	Rp. 5	Transaksi telah sesuai dengan ketentuan intern BPR Rudo melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK-DIR/BPR-

									RI/1/2019 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa. Keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan adalah dalam struktur pihak yang memiliki benturan kepentingan memiliki hak suara dalam putusan RUPS.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/politik)	Penjelasan Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	21 Januari 2020, 20 Februari 2020, 19	Sosial	Sebagai donatur Klenteng Pelita Semarang dana diberikan setiap bulan	Rp. 1.375.000

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/politik)	Penjelasan Kegiatan	Jumlah (Rp)
	Maret 2020, 24 April 2020, 26 Mei 2020, 19 Juni 2020, 23 Juli 2020, 18 Agustus 2020, 21 September 2020, 19 Oktober 2020, 18 November 2020.		sebesar Rp. 125.000, untuk operasional klenteng. Proposal pengajuan tanggal 02 Oktober tahun 2019.	
2.	2 Maret 2020	Sosial	Sumbangan sponsorship Lomba menyanyi dalam rangka acara paskah di KB-TK Sola Gratia Semarang.	Rp. 350.000
3.	13 Maret 2020	Sosial	Sumbangan Lilin untuk klenteng Hwie Wie Kiong Semarang	Rp. 2.300.000
4.	30 September 2020	Sosial	Sumbangan Lampion untuk klenteng Siu Hok Bio Semarang.	Rp. 1.000.000

Seluruh pemberian dana bertujuan untuk kegiatan sosial, sampai dengan akhir tahun 2020 PT. BPR Rudo Indobank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

III. HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR RUDO INDOBANK

Hasil penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Rudo Indobank tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Aspek/ Faktor yang dinilai	Nilai Struktur		Nilai Proses		Nilai Hasil		Jumlah nilai SPO	Bobot Faktor	Nilai Akhir
		Nilai	Bobot 50%	Nilai	Bobot 40%	Nilai	Bobot 10%			
1.	Pelaksanaan tugas Dan Tanggungjawab Direksi	3,00	1,50	2,88	1,15	3,00	0,30	2,95	20%	0,59
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2,22	1,11	2,50	1,00	2,00	0,20	2,31	15%	0,35
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau Fungsi komite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	3,00	1,50	3,00	1,20	3,00	0,30	3,00	10%	0,30
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,60	1,30	3,00	1,20	3,00	0,30	2,80	10%	0,28
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,40	1,20	2,25	0,90	2,00	0,20	2,30	10%	0,23
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,00	1,00	2,00	0,80	2,00	0,20	2,00	2,50%	0,05
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	3,33	1,67	2,86	1,14	3,00	0,30	3,11	10%	0,31
9.	Penyediaan Dana Pihak Ketiga (<i>Related Party</i>) dan Debitur besar (<i>Large Exposure</i>)	3,00	1,50	3,00	1,20	2,5	0,25	2,95	7,50%	0,22
10.	Rencana Bisnis BPR	3,00	1,50	3,00	1,20	3,00	0,30	3,00	7,50%	0,23
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan Laporan Internal	2,00	1,00	2,25	0,90	2,50	0,25	2,15	7,50%	0,16
NILAI KOMPOSIT										2,72
PREDIKAT KOMPOSIT "CUKUP BAIK"										

Dengan nilai komposit yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

- 1) Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah Direksi di posisi Desember 2020 belum dapat dipenuhi, akan tetapi Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh BPR Rudo. Sehingga susunan Pengurus Bank sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-585/KR.0313/2020, tanggal 24 November 2020 Perihal Pencatatan Pengunduran Diri Anggota Direksi.
- 2) Pembentukan Fungsi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern , dimana Fungsi Fungsi yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
- 3) PE Audit Intern, PE Fungsi Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi yang telah ditunjuk oleh Direksi.
- 4) Fungsi Manajemen Risiko, BPR Rudo telah memiliki pedoman yang dapat membantu dalam mengelola risiko risiko yang akan dihadapi dalam melaksanakan kegiatan operasional Bank.
- 5) Kinerja keuangan Bank belum secara riil dan maksimal meningkat, Pencapaian *Business Plan* sampai akhir Desember 2020 belum dapat mencapai target sesuai rencana.
- 6) Kekuatan Pelaksanaan GCG
 - ✓ Seluruh pelaksanaan kegiatan operasional Bank wajib dilaksanakan berdasarkan SPO, ketentuan intern dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Tata Kelola PT. BPR Rudo Indobank tahun laporan Desember 2020 untuk periode penilaian Desember 2020. Laporan ini disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/ SEOJK.03/2020 perihal Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR . Dengan disusunnya laporan pelaksanaan Penerapan tata kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan/ *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR. Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Rudo Indobank tahun buku 31 Desember 2020. Demikian Laporan ini disampaikan, Terima kasih.

Semarang, 23 April 2021

PT. BPR RUDO INDOBANK

Ttd



Wahyu Mustikasari
Komisaris Utama



Pebruono
Direktur Utama

- ✓ Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar, dan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat sesuai dengan ketentuan, selanjutnya rekomendasi serta saran kepada Direksi tetap diberikan secara berkesinambungan. Agar dapat memberikan arahan Direksi dalam menentukan strategi Bank.
- ✓ Fungsi kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern dapat berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola yakni melaksanakan tugas secara independen.
- ✓ Fungsi Manajemen Risiko hendaknya meningkatkan dalam pemberian rekomendasi atas pengelolaan risiko yang ada guna membantu Direksi dalam membuat keputusan.
- ✓ Seluruh kekuatan pelaksanaan penerapan Tata Kelola tersebut hendaknya secara optimal dan menjadi komitmen bersama.